



BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT



BPK Sulbar Tingkatkan Koordinasi PENCEGAHAN COVID-19

BPK melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan yang dipimpin oleh Sdr. **Ardiansyah** dkk mengawali kunjungan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sesuai arahan Kepala Perwakilan, **Muhamad Toha Arafat** dan di sambut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat **Muhammad Alief Satria Lahmuddin**.
(lanjut hal 5)

HOT TOPIC

Serah Terima Jabatan Kakan

BPK Sulbar Raih Penghargaan Kinerja Terbaik

Kunjungan Komisi III DPRD

Penyerahan LHP Banparpol 2019





KALAN BARU SEBAGAI SARANA PENYEGARAN DALAM LINGKUNGAN KERJA BPK SULBAR



BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada 11 Februari 2020 menyelenggarakan kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat yang lama **Eydu Oktain Panjaitan**, kepada penerusnya **Muhamad Toha Arafat**.

berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/K/X-X.3/01/2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Penandatanganan naskah Sertijab dan penyerahan buku Memori Akhir Jabatan disaksikan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV / Anggota IV BPK RI, **Ir.Isma Yatun, M.T., CSFA.**, beserta Auditor Utama Keuangan Negara VI, **Dr.Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA.**, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, para Bupati se-Sulawesi Barat, para Ketua DPRD, se-Sulawesi Barat, serta para Pimpinan Instansi vertikal di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

"Integrity is Doing The Right Think.

Even When No One is Watching."

C.S. LEWIS



BPK SULBAR RAIH PENGHARGAAN SATKER BERKINERJA TERBAIK SEMESTER II TA 2019

Bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Mamuju, Lantai 5 Jalan Soekarno Hatta, Mamuju, Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Indikator Kinerja Pengguna Anggaran (IKPA) TA 2019 dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2020 serta Sosialisasi Jabatan Fungsional Terbuka Pengelola Dana APBN.



Selain FGD, pada kegiatan tersebut juga dilakukan penganugerahan Penghargaan kepada Satker-satker Berkinerja Terbaik pada Semester II TA 2019. Pada kesempatan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk pertama kalinya berhasil meraih Predikat Kedua sebagai Satker Berkinerja Terbaik dalam Kategori DIPA di atas 10 Miliar se-Provinsi Sulawesi Barat.

TAHUKAH KAMU?



Dalam pasal I Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas.



KUNJUNGAN KOMISI III DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT- BPK Tidak Bertindak Sebagai Pengambil Keputusan atas Pelaksanaan Kegiatan Entitas



Dari Kiri Kasubag Hukum Dedi Setyawan, Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Halid, Kabid PSDA Dinas PUPR Provinsi Marliah Muin, Kasubaud Ali Wardhana, Kasetlan Asih Waryanti, Kalan M. Toha Arafat, Wakil Ketua Kom III DPRD Provinsi Andi Muslim Fattah, Staf PJSA Balai Sungai M. Sabri, Kasi Bina Manfaat Dinas PUPR Provinsi Nasrul, Staf PJSA Balai Sungai Kristian HS.

BPK Perwakilan Sulawesi Barat menerima kunjungan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU & PR) Provinsi Sulawesi Barat, dan Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Wilayah Sungai Sulawesi III. Disambut langsung oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Sulawesi Barat **Muhamad Toha Arafat** beserta jajaran, pertemuan yang diinisiasi oleh Dinas PU & PR Provinsi Sulawesi Barat tersebut bertujuan untuk dengar pendapat terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menambah dilematis Dinas PU & PR dalam hal menentukan wilayah kewenangannya terkait sungai, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang disahkan pada Maret 2004, belum memuat pembagian wilayah sungai di Provinsi Sulawesi Barat karena Provinsi Sulawesi Barat baru dibentuk pada Oktober 2004. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tersebut juga belum memuat adanya turunan peraturan yang mengatur lebih rinci sehingga kewenangan sungai dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat masih abu-abu.

Terkait dengan permasalahan tersebut, Kalan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa BPK tidak bertindak sebagai pengambil keputusan atas permasalahan kewenangan wilayah sungai yang tengah dihadapi oleh Dinas PU & PR Provinsi Sulawesi Barat, tetapi sebatas dalam memberikan saran serta langkah terbaik yang bisa dilakukan sebagai pemecahan masalah. Dinas PU & PR tidak bisa menjadikan pendapat BPK sebagai dasar hukum dalam penetapan kewenangan wilayah sungai di Provinsi Sulawesi Barat.



BPK Sulbar Tingkatkan Koordinasi Guna Pencegahan COVID-19

Humas BPK Sulbar memperoleh informasi terkait *Progress* Mitigasi Penanganan COVID-19 yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat per tanggal 17 Maret 2020 meliputi penyiapan Surat Edaran Gubernur Sulbar terkait pencegahan COVID-19, Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat, serta penetapan status wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagai “Siaga Darurat Bencana” atas COVID-19.

Selain itu, Tim juga berkunjung ke RSUD Provinsi Sulawesi Barat yang ditemui langsung oleh Direktur **Indahwati Nursyamsi**. Tim memperoleh informasi terkait kesiapan rumah sakit dalam penanganan COVID-19 seperti pembentukan Tim Satgas pencegahan penyebaran COVID-19, penyiapan dan penambahan ruangan isolasi dengan cara merelokasi ruangan.

CEGAH PENYEBARAN COVID-19, BPK SULBAR AMBIL LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS



Turut berpartisipasi aktif dalam pencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melakukan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan Kantor, lingkungan Mess Pegawai dan Rumah Jabatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pegawai. Penyemprotan disinfektan yang akan dilakukan sebanyak empat kali dalam sebulan kedepan tersebut. Upaya pencegahan lain seperti pengadaan cairan hand sanitizer, masker untuk para pegawai, *Thermal Gun*, serta pembagian multivitamin pada pegawai.

YUK! CEGAH VIRUS CORONA

<p>1 Bersihkan tangan sebelum memegang wajah</p>	<p>Cuci tangan pakai sabun cair atau alkohol 70=100% hndrub</p> <p>2</p>	<p>Keringkan tangan dengan tisu 3</p>	<p>4 Tutup mulut dan hidung saat bersin/batuk</p>	<p>Gunakan masker saat terkena gangguan pernapasan</p> <p>5</p>	<p>Patuhi petunjuk keamanan makanan</p> <p>6</p>
---	---	--	--	--	---

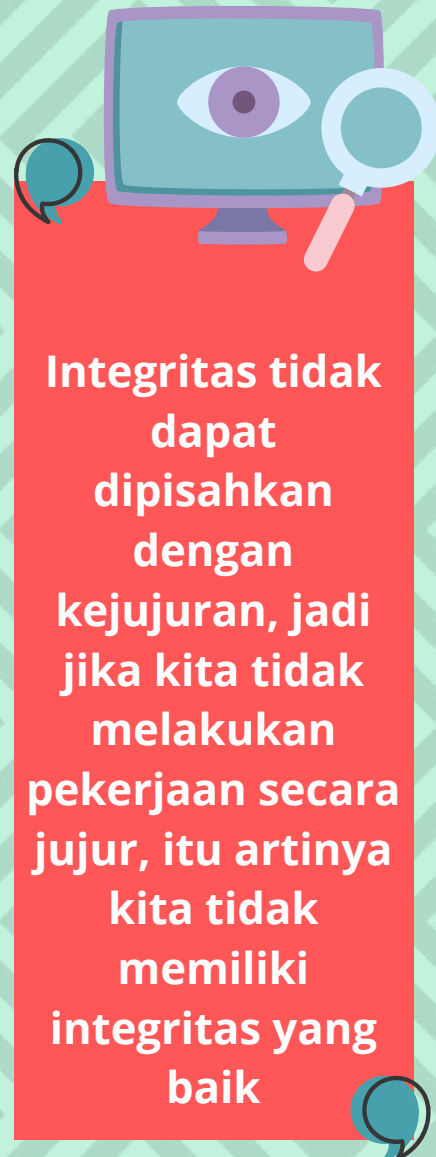
PEMANTAUAN TLRHP BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT SEMESTER II TAHUN 2019



Kegiatan pemantauan kali ini bertujuan guna mengetahui perkembangan status tindak lanjut yang dilakukan pejabat entitas terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas LHP Semester II Tahun 2019. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dimaksud dapat dikenai sanksi administratif. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) terkait LHP Kinerja dan PDDT yang telah dilaksanakan pada semester II tahun 2019.

Kegiatan pemantauan dan pembahasan TLRHP ini dilaksanakan selama satu hari yaitu pada Hari Senin, 16 Maret 2020 dan bertempat di ruang auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat serta diikuti oleh tujuh entitas pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Barat yang dihadiri oleh inspektur ataupun pejabat lain yang mewakili. Kegiatan yang semula direncanakan sampai dengan tanggal 17 Maret ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas LHP BPK yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan aplikasi SiPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut). Keputusan pembatalan kegiatan pada tanggal 17 Maret ini diambil demi menjaga keamanan dan keselamatan pegawai ditengah mewabahnya pandemi *Corono Virus Disesase* (COVID-19).

Dalam sambutan yang disampaikan pada saat pembukaan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat, **Muhamad Toha Arafat** didampingi oleh Kepala Subauditorat **Ali Wardhana** menyampaikan bahwa tindak lanjut merupakan tugas dari Entitas yang diperiksa. Melalui kegiatan ini, Muhamad Toha Arafat berharap agar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dapat memantau dan memastikan bahwa tindak lanjut pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya dan ditindaklanjuti oleh entitas secara tepat waktu. Setelah acara pembukaan, seluruh entitas mulai melakukan pembahasan TLRHP bersama dengan pembahas yang merupakan para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.



Integritas tidak dapat dipisahkan dengan kejujuran, jadi jika kita tidak melakukan pekerjaan secara jujur, itu artinya kita tidak memiliki integritas yang baik

MINIMALISIR PRAKTIK MONOPOLI KPPU GANDENG BPK SULBAR

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI dan KPPU Kantor Wilayah IV Makassar. Kunjungan tersebut dilaksanakan sebagai media sosialisasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perspektif Persaingan Usaha yang Sehat kepada lingkup Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud implementasi Kesepakatan Bersama antara KPPU RI dan BPK RI Nomor 1/KB/I-XII/2/5/2016 dan Nomor 07/KPPU/NK/V/2016 tentang Kerja sama dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Pencegahan dan Penanganan Perkara Dugaan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.



Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat, **Muhamad Toha Arafat** dan Kepala Subauditorat, **Ali Wardhana** beserta jajaran menyambut baik kunjungan Komisioner KPPU RI **Dinni Melanie**, yang didampingi oleh Kepala Kanwil KPPU IV Makassar **Hilman. P**, beserta rombongan.

Pada kesempatan tersebut, Komisioner KPPU RI, melakukan sosialisasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perspektif Persaingan Usaha yang Sehat kepada lingkup Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, disampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir praktik monopoli sekaligus usaha curang dalam rangka untuk membangun iklim usaha yang positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berharap agar kerja sama antara KPPU dan BPK dapat tercipta sinergi dan keterpaduan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing secara efektif.



PENYERAHAN LHP ATAS LPJ BANPARPOL TA 2019 SE-PROVINSI SULAWESI BARAT

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari APBD TA 2019 se-Provinsi Sulawesi Barat. Penyerahan LHP dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Barat yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat, **Muhamad Toha Arafat** didampingi oleh Kepala Subauditorat **Ali Wardhana** dan Kepala Sekretariat **Asih Waryanti** kepada Para Kepala Daerah atau Pejabat yang mewakili dan Para Ketua DPRD se-Provinsi Sulawesi Barat atau Pejabat yang mewakili.

Pada masa pandemi corona penyerahan dibagi menjadi dua hari. Hari pertama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan LHP kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Mamasa dan Provinsi Sulawesi Barat. Khusus penyerahan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi berupa telekonferensi antara Kalan dengan Pemerintah Sulawesi Barat, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah **Muhammad Idris** beserta jajarannya. Pada hari kedua, penyerahan LHP berturut-turut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Majene, dan Mamuju Tengah.



Adapun hasil pemeriksaan BPK atas LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2019 se-Provinsi Sulawesi Barat bahwa dari 82 Partai Politik (Parpol) yang diperiksa, terdapat 65 Parpol yang telah sesuai dengan kriteria, 17 Parpol yang telah sesuai dengan kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu, serta yang termasuk kategori tidak sesuai dengan kriteria adalah 0 Parpol.



PENUNDAAN PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN LKPD TA 2019 SE-PROVINSI SULAWESI BARAT

Bersamaan penyerahan LHP Banparpol, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Unaudited* Tahun Anggaran 2019 dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat. Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat, **Muhamad Toha Arafat** didampingi oleh Kepala Subauditorat **Ali Wardhana** dan Kepala Sekretariat **Asih Waryanti** menerima LKPD *Unaudited* secara terpisah dari masing-masing pimpinan Kepala Daerah atau yang mewakili.

Kepala Perwakilan mengapresiasi kinerja pemerintah daerah karena telah menyampaikan LKPD *Unaudited* kepada BPK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (3) tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *Unaudited* disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu disampaikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan akan disampaikan kemudian, menunggu arahan pimpinan terkait kebijakan pemeriksaan dalam masa pandemi corona.



Gallery BPKawan



Penyerahan LHP Banpol dan LK Unaudited bersama Pemda Mamasa



Foto bersama kalan baru dan kalan lama beserta istri

Pak Kalan memakai masker dan sarung tangan sebagai upaya pencegahan COVID-19 loh



Suasana penyampaian LHP Banparpol dan LK Unaudited Pemprov via zoom



Suasana penyampaian LHP Banparpol dan LK Unaudited Pemkab Mamuju Tengah via zoom



#dirumahaja

Edisi jalan-jalan kali ini tetap di rumah aja ya

Jangan jalan-jalan dulu BPKawan. Semoga wabah corona segera berakhir dan bisa kembali ke rutinitas seperti biasanya .
Segenap redaksi yang bertugas mengucapkan:

Marhaban Ramadan Mubarak

REDAKSI

Pengarah : Muhamad Toha Arafat

Penanggungjawab : Asih Waryanti

Ketua : Ardiansyah

Sekretaris : Dedi Setyawan

Tim Redaksi : Suci Nurlaeli

Dicky Febriano

Husen Wahyu Adi

Destri Yudarni

Hilman Saputera

Email : humastu.sulbar@bpk.go.id

Redaksi menerima saran, kritik, maupun artikel yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan, kegiatan ke-BPK-an dan materi lainnya. Setiap kiriman artikel yang dimuat akan mendapatkan cinderamata menarik dari redaksi

